

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“Hak Mendahulu Negara atas Pelunasan Utang Pajak terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan”** dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu, : (1) Apa akibat hukum hak mendahulu negara atas pelunasan utang pajak terhadap pemegang jaminan kebendaan? (2) Apa perlindungan hukum pemegang jaminan kebendaan terhadap adanya hak mendahulu negara?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa kedudukan pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditur *preference* akan bergeser karena negara sebagai posisi yang dominan mempunyai kekuatan hak mendahulu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU KUP sehingga negara berhak melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak termasuk dalam hal apabila obyek tersebut ternyata penguasannya telah berpindah kepada pihak lain atau menjadi jaminan utang tertentu. Dalam hal ini pelunasan utang kepada kreditor lain akan ditangguhkan dan akan diselesaikan setelah utang pajak selesai. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang jaminan kebendaan yakni dengan melakukan upaya hukum preventif yakni dengan melakukan penambahan klausul pada perjanjian kredit dalam hal melakukan penggantian objek jaminan apabila objek jaminan utama telah disita untuk pelunasan utang pajak.

Kata Kunci : Hak Mendahulu Negara, Utang Pajak, Jaminan Kebendaan

ABSTRACT

This thesis is entitled "**The State's Priority Rights for the Payment of Tax Debt to Holders of Material Assets**" with 2 (two) main issues, namely,: (1) What is the legal consequence of the state's prior right to repay the tax debt to the holder of material guarantees? (2) What is the legal protection of the holder of material guarantees for the existence of rights before the state?

This research is a type of legal research with normative legal research methods. In addition, this research uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach.

The results of this thesis study indicate that the position of the holder of material guarantees as a preference creditor will shift because the state as the dominant position has the power of the preceding rights as stipulated in Article 21 of the KUP Law so that the state has the right to confiscate the goods included in the case if the object turns out the control has been transferred to another party or a certain debt guarantee. In this case the repayment of debt to other creditors will be suspended and will be settled after the tax debt is completed. Legal remedies that can be carried out by the holder of material guarantees are by carrying preventive legal efforts, namely by adding clauses to the credit agreement in the case of replacing collateral objects if the main collateral object has been confiscated for repayment of tax debt.

Keywords: State Priority Rights, Tax Debt, Material Assurance